

Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar

Maman Suryaman

FBS Universitas Negeri Yogyakarta

Surel: maman_suryaman@uny.ac.id

Kurikulum merupakan “ruh” pendidikan yang harus dievaluasi secara inovatif, dinamis, dan berkala sesuai dengan perkembangan zaman dan IPTEKS, kompetensi yang diperlukan masyarakat dan pengguna lulusan. Perubahan kurikulum – dengan demikian – menjadi keniscayaan. Bahkan, perkembangan IPTEKS yang sangat cepat tidak lagi memungkinkan dunia pendidikan berlama-lama dengan “zona nyaman” kurikulum yang berlaku. Dapat dibayangkan – terlepas dari konteks politik yang menyertainya -- dalam kurun waktu enam tahun Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sudah berubah tiga kali, yakni: Permenristekdikti Nomor 49 Tahun 2014-Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015-Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 berbarengan dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Hal ini mencerminkan bahwa perubahan menuntut percepatan, bukan semata-mata kecepatan.

Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum – apalagi di era Industri 4.0 -- adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berporos kepada berakhlak mulia. Salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut adalah lahirnya kebijakan hak belajar bagi mahasiswa di luar program studi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi). Kebijakan yang populer dengan nama Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal.

Kebijakan tersebut berimplikasi kepada munculnya tuntutan kepada perguruan tinggi (PT) untuk merancang kurikulum dan melaksanakan proses pembelajaran yang

inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil beban belajar (SKS) di luar program studi, baik dalam satu perguruan tinggi (PT), di luar PT, dan/atau non-PT. Artinya, mahasiswa difasilitasi untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam dunia kerja. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mengembangkan kurikulum berbasis merdeka belajar?

Isu-isu Utama yang Perlu Direspons

Isu-isu yang berkembang di masyarakat tentulah menjadi bagian terpenting dalam pengembangan kurikulum. Isu pertama terkait dengan visi Indonesia. Ada empat pencapaian di dalam Visi Indonesia 2030, yakni masuk dalam lima besar ekonomi dunia, sedikitnya 30 perusahaan Indonesia akan masuk dalam daftar 500 perusahaan besar dunia, pengelolaan alam yang berkelanjutan, dan terwujudnya kualitas hidup modern yang merata. Munculnya pembaharuan Visi Indonesia pada tahun 2045 menjadi negara terbesar kelima di dunia dengan fokus pada PDB per kapita yang mencapai 23.199 USD mengindikasikan adanya upaya percepatan yang semakin masif.

Upaya untuk mencapai Visi Indonesia 2030 dan/atau 2045 tanpa didukung sumber daya manusia yang tangguh serta sarana dan prasarana yang memadai amatlah sulit. Apalagi hingga saat ini Indonesia belum termasuk ke dalam 10 besar ekonomi dunia. Bahkan, menurut prediksi IMF (2006) pada tahun 2040 Indonesia belum juga masuk kedalam 10 besar ekonomi dunia. Hal ini berbeda dengan China. Prediksi IMF di 2006 semakin mendekati kenyataan, bahkan bisa diraihnya lebih cepat lagi karena posisi China saat ini sudah bertengger di posisi ke-2 setelah AS (IMF, 2019). Dalam kondisi seperti ini beban yang harus ditanggung PT adalah menyiapkan SDM yang mampu menjadi agen pembaharuan, berdaya saing unggul, dan mampu memulihkan permasalahan ekonomi pasca-Covid-19.

Isu kedua adalah perkembangan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial akan sangat berperan karena diprediksi pada 2020, 200 milyar objek perangkat teknologi (internet to things), yakni perangkat teknologi yang terhubung internet (Intel, 2015) akan dirasakan manfaatnya. Literasi lama tidak cukup (membaca, menulis, dan matematika). Literasi baru adalah literasi data (kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi (*big data*) di dunia digital; literasi teknologi (memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi; literasi manusia (*humanities*, komunikasi, dan disain) (Aoun, 2017).

Isu ketiga terkait dengan Revolusi Industri 4.0. Adanya kekhawatiran seperti yang disampaikan oleh Damhauser (2019) bahwa kekhawatiran di era industri 4.0 adalah melemahnya budaya baca dan budaya buku masyarakat. Pendidikan yang demikian tidak akan dapat diharapkan untuk dapat menunjang pembangunan bangsa, melainkan sebaliknya, yakni akan melahirkan masalah-masalah baru, seperti *unprepared and unskilled educated young*. Seiring dengan perkembangan industri 4.0 yang kemudian memunculkan education 4.0, pendidikan berbasis luaran atau dikenal sebagai Outcome-based Education (OBE) saat ini menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan pendidikan.

Isu keempat terkait dengan literasi masyarakat. Hasil survei UNESCO tahun 2012 mencatat minat baca di Indonesia terendah di Asia Tenggara. Menurut badan itu, indeks minat membaca Indonesia baru 0,001, dalam arti dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang memiliki minat membaca. Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) tahun 2015 menguatkan survei tersebut dengan temuan bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia masih berada di ranking 62 dari 72 negara dan penelitian UNESCO 2016 dengan tajuk *World's Most Literate Nations 2016* hasil Central Connecticut State University (CCSU), Indonesia berada di ranking 60 dari 61 negara atau hanya satu tingkat di atas Botswana. CCSU merilis peringkat literasi negara-negara di dunia pada Maret 2016 berdasarkan lima indikator kesehatan literasi negara, yakni perpustakaan, surat kabar, pendidikan, dan ketersediaan komputer. Padahal infrastruktur Indonesia berada di urutan ke 34, masih lebih unggul dari Jerman, Portugal, Selandia Baru, dan Korea Selatan (Kompas.com, 2016).

Faktor rendahnya minat serta budaya literasi merupakan masalah klasik, yakni akses, harga, dan mutu buku. Hasil penelitian Kemdikbud (Kompas, 23-06-2019) dari Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) penyebab rendahnya minat dan kebiasaan membaca itu antara lain kurangnya akses, terutama untuk di daerah terpencil. Secara lebih rinci dilaporkan Kemdikbud bahwa ada empat dimensi indeks literasi yang menjadi pokok bahasan dalam indeks tersebut, yakni dimensi kecakapan, akses, alternatif, dan budaya. Dari keempat dimensi indeks literasi dimensi kecakapan bisa dilihat dari indikator bebas buta aksara dan rata-rata lama sekolah; dimensi akses terdiri atas perpustakaan daerah, perpustakaan umum, perpustakaan komunitas, dan perpustakaan sekolah; dimensi alternatif antara lain penggunaan internet, membaca daring, dan media online; dimensi budaya antara lain meminjam buku di perpustakaan, memanfaatkan taman bacaan, serta membaca koran dan buku. Dari keempatnya, hasil survei untuk dimensi akses adalah yang paling rendah,

yaitu 23,09 persen, dimensi kecakapan 75,92 persen, dimensi alternatif 40,49 persen, dan dimensi budaya 28,50 persen.

Isu kelima terkait dengan kebijakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat (1)). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri atas empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian. Perumusan CPL mengacu pada deskriptor KKNI khususnya pada bagian Pengetahuan dan Keterampilan khusus, sedangkan pada bagian Sikap dan Keterampilan Umum dapat diadopsi dari SN-Dikti. Sedangkan penyusunan kurikulum selengkapnya mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan 8 Standar Nasional Penelitian, dan delapan (8) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Secara filosofis, kurikulum seharusnya mampu menghantarkan mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta membentuk budi pekerti luhur, sehingga dapat berkontribusi untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, mendorong semangat kepedulian kepada sesama bangsa dan umat manusia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan serta kejayaan bangsa Indonesia. Menurut Ornstein & Hunkins, 2014, kurikulum harus menjembatani mahasiswa agar pengetahuan yang dikaji dan dipelajari mampu mengantarkannya memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat.

Secara sosiologis kurikulum yang bermutu juga harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dampak dari kurikulum demikian adalah tumbuhnya kelincahan budaya (*cultural agility*) yang dianggap sebagai mega kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon profesional di abad ke-21 ini dengan penguasaan minimal tiga kompetensi yaitu, minimisasi budaya (*cultural minimization*, yaitu kemampuan kontrol diri dan menyesuaikan dengan standar, dalam kondisi bekerja pada tataran internasional) adaptasi budaya (*cultural adaptation*), serta integrasi budaya (*cultural integration*) (Caliguri, 2012).

Secara psikologis, kurikulum juga harus mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan

berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (higher order thinking); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan (Zais, 1976, p. 200); kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

Di dalam konteks berbangsa dan bernegara kurikulum merupakan perangkat pembelajaran yang amat strategis untuk menyemaikan dan membentuk konsepsi dan perilaku individu tentang kesadaran identitas. Kesadaran identitas menurut (Suwignyo, 2007:39) menunjuk pada kemampuan serta proses memahami perubahan jati diri terkait cara berpikir, kemandirian, dan orientasi pribadi (aspek internal-psikologis) serta posisi, peran, dan tanggung jawab sosial individu (aspek eksternal-sosiologis). Oleh karena itu, proses transformasi sistem nilai, makna dan simbol material dan nonmaterial dalam bidang kehidupan manusia mencakupi juga persoalan ekonomi, religi, kekuasaan, pertanian, kelautan, keuangan, kesehatan, pakaian, makanan, arsitektur, tata rumah, hukum, hak milik, dan kemandirian alam pikir atau subjektivitas (Merry, 2003).

Konsepsi tersebut sejalan dengan Pembukaan UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan kata lain, relevansi kurikulum dengan kesadaran identitas tercermin melalui pemaknaan yang mendalam bahwa pendidikan yang mencerdaskan adalah pendidikan dengan kurikulum yang mengarah pada pembangunan Indonesia menjadi negara bangsa yang maju, modern, bermoral, berdisiplin, beretos kerja tinggi, menguasai kemampuan teknis dan profesional, memiliki sikap rasional dan kemampuan intelektual, demokratis, bertanggung jawab, serta makmur dan sejahtera.

Di dalam perspektif pembelajaran, kurikulum merupakan seperangkat rencana yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sesuai dengan konteks berbangsa dan bernegara, kurikulum dalam perspektif ini haruslah menjadi bagian dari penyemaian dan pembentukan konsepsi dan perilaku individu tentang kesadaran identitas kebangsaan dan kenegaraan. Dengan demikian, kurikulum bukan hanya menjadi hiasan selama pertemuan di ruang-ruang kelas antara dosen dengan mahasiswa, melainkan bagian terpenting di dalam mengubah karakteristik manusia Indonesia yang

maju, modern, bermoral, berdisiplin, beretos kerja tinggi, menguasai kemampuan teknis dan profesional, memiliki sikap rasional dan kemampuan intelektual, demokratis, bertanggung jawab, serta makmur dan sejahtera.

Dalam era kekinian, tentulah produk kurikulum sudah harus mengalami perubahan seiring dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi. Terdapat dua hal esensial yang perlu dicermati bersama, yakni profil lulusan serta capaian belajar (*learning outcomes*) atau sering disebut dengan standar kompetensi lulusan dan kualifikasi capaian.

Kedua dasar tersebut dijadikan landasan di dalam melakukan perubahan kurikulum program studi di Indonesia. Namun, persoalan yang muncul adalah adanya ketidakselarasan antara satu komponen dengan komponen lain, seperti pemahaman di dalam merumuskan profil lulusan (PL) dan dielaborasi ke dalam capaian pembelajaran (CP), CPMK, serta pembelajaran yang belum selaras menunjukkan adanya pemahaman yang kurang memadai. Akibatnya, belum semua gambaran PL relevan dengan dunia kerja. Hal senada juga terjadi di dalam merumuskan CP. Tidak semua PL memiliki CP. Akibatnya, pembelajaran di level implementasi juga tidak akan selaras.

Diskusi berikutnya adalah terkait dengan orientasi capaian yang baru sampai di level kompetensi. Dalam perkembangan baru, kompetensi merupakan capaian yang masih berorientasi ke masa kini. Menurut Kamdi (2016:15) terdapat tiga orientasi pendidikan tinggi, yakni *training model*, *professional development model*, dan *capability development model*. Model pertama dan kedua sangat populer dalam pendidikan ala industrial yang “mengeksplorasi” sumber daya manusia untuk tujuan reproduksi ekonomi melalui pendidikan. Teori efisiensi sosial yang menggambarkan bahwa kurikulum pendidikan didisain berbasis kompetensi dengan rujukan utama kebutuhan job pada area okupasi atau profesi tertentu. Tugas pendidikan adalah menjadikan proses secara efisien karena fiksasi cakupan kompetensi dalam kurikulum amat jelas, definitif, dan rigid. Sebaliknya, model ketiga tidak menggunakan job atau profesi tertentu sebagai rujukan utama pendidikan, melainkan menggunakan kekuatan potensial individu sebagai rujukan utama pendidikan. Orientasi pendidikan dengan model ketiga adalah pengembangan kapabilitas yang melampaui kompetensi. Mencermati dasar perubahan kurikulum pendidikan tinggi yang demikian mencerminkan bahwa praksis pendidikan tinggi di Indonesia masih menggunakan model pertama dan kedua, yakni berbasis kompetensi, dan dominasi model

training untuk menyiapkan mahasiswa sebagai calon pekerja. Namun, model kapabilitas masih belum menjadi visi ke depan.

Model ketiga ini telah mendekonstruksi popularitas dua model pertama. Menurut Kamdi (2016:15-16) kebutuhan belajar berubah dari memenuhi blueprint profesi manusia yang diturunkan dari definisi peran sosial atau profesi tertentu bergeser ke aras pengembangan kapabilitas peserta didik untuk menciptakan profesi yang berpusat pada keunggulan personalnya. Di samping itu, dunia profesi mengalami dinamika kehidupan yang tidak mudah lagi diprediksi yang mengakibatkan makin kaburnya definisi peran sosial. Kompetensi merupakan unsur penting dari kapabilitas. Namun, orang yang kapabel adalah mereka yang dapat berbuat secara efektif dalam konteks yang tidak diketahui atau masalah baru. Untuk bisa menjadi kapabel, orang membutuhkan pengalaman belajar yang berbeda dengan belajar kompetensi. Kemampuan belajar bagaimana cara belajar, nilai dan kepercayaan diri, misalnya, tidak dapat dicapai hanya dengan menggunakan pendekatan perilaku sederhana. Berbagai pendekatan perilaku menjadi sangat penting untuk dikembangkan di dalam perspektif pembelajaran inovatif.

Dalam perspektif pembelajaran inovatif, kurikulum harus sesuai dengan prinsip proses perkuliahan (kesesuaian proses dengan karakteristik mata kuliah, keberagaman metode yang mengakomodasi perbedaan individu mahasiswa, penataan tingkat kesulitan, mengatur interaksi dan partisipasi mahasiswa, menekankan berbagai variasi belajar, dan mendorong kemampuan baru) serta dapat lebih mengaktifkan interaksi kelas (Sukmadinata, 2013:152-153). Untuk mencapai perspektif tersebut, model pembelajaran dalam kurikulum haruslah memiliki berbagai alternatif pembelajaran, bentuk pembelajaran (kuliah, responsi/tutorial, seminar, dan praktikum) dan metode perkuliahan (berbasis masalah, berbasis proyek, penelitian, dan pengabdian). Hal ini sejalan dengan hakikat kurikulum bahwa kurikulum merupakan komponen utama pendidikan dan sebagai pedoman pembelajaran. Jika antarsubkomponen kurikulum disusun secara baik, proses pembelajaran akan selalu merujuk kepada kurikulum yang baik. Hal-hal inilah yang menjadikan perubahan kurikulum memiliki esensi bahwa kurikulum yang berorientasi ke masa depan haruslah menjadikan pembelajaran yang bermakna bagi lahirnya insan-insan berkualitas.

Definisi kurikulum di era Revolusi Industri 4.0 akan dihadapkan pada tantangan yang lebih rumit. Oleh karena itu, kurikulum harus didefinisikan sebagai *the evolving document* atau dokumen yang terus berubah. Sebagai contoh, mata kuliah boleh sama tetapi isi kurikulum harus terus disempurnakan, kompetensi seseorang adalah kemampuan

yang digambarkan sebagai kemampuan beradaptasi, kemampuan beradaptasi adalah pembelajar sepanjang hayat.

Orientasi Kurikulum Merdeka Belajar

Seiring dengan perkembangan industri 4.0 yang kemudian memunculkan education 4.0, pendidikan berbasis luaran atau dikenal sebagai *Outcome-Based Education* (OBE) saat ini menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan pendidikan.

Secara umum terdapat dua kategori instrumen pengukuran pendidikan, yakni pendidikan berbasis input dan pendidikan berbasis *outcomes*. Pendidikan berbasis input diukur berdasarkan indikator kepemilikan “harta kekayaan” suatu lembaga pendidikan, seperti keuangan, sarana-prasarana, ruang kelas, perpustakaan, jumlah dosen, dan sebagainya, sedangkan OBE bertumpu pada luaran pendidikan, seperti jumlah lulusan, IPK, dan tingkat keberhasilan lulusan. Artinya, yang diukur adalah kompetensi lulusannya sesuai dengan capaian yang direncanakan (Karnakata, 2015). Dalam bahasa yang lebih populer, proses pengajaran bukan sekedar mengawal konten, namun bagaimana mahasiswa dapat mendapatkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian pembelajaran adalah janji program studi pada masyarakat.

Salah satu orientasi kurikulum merdeka belajar adalah OBE. OBE adalah proses pendidikan yang berfokus pada pencapaian hasil konkret yang ditentukan (pengetahuan yang berorientasi pada hasil, kemampuan dan perilaku). OBE adalah proses yang melibatkan penataan kurikulum, penilaian, dan praktik pelaporan dalam pendidikan yang mencerminkan pencapaian pembelajaran dan penguasaan tingkat tinggi daripada akumulasi kredit.

Terdapat lima prinsip OBE, yakni (1) fokus pada CP, (2) rancangan kurikulum menyeluruh, (3) memfasilitasi kesempatan belajar, (4) sesuai dengan pembelajaran konstruktif, dan (5) menggunakan siklus *Plan-Do-Check-Action* (PDCA). CP harus disusun berdasarkan visi dan misi PT dan tujuan program studi serta sesuai dengan Profil Lulusan dengan selalu menyesuaikan pada para pemangku kepentingan (internal dan eksternal). CP yang sudah sesuai menjadi tumpuan dalam merumuskan CPL, CPMK, dan sub-CPMK. Rancangan kurikulum harus ditinjau secara menyeluruh: CP, asesmen, dan pusat pembelajaran agar saling bersesuaian. Kesempatan belajar mahasiswa difasilitasi sampai pada bentuk tugas, proyek, praktik, e-learning, dan mentoring. Hal ini senada dengan sistem pembelajaran 4.0, yakni pembelajaran konstruktif yang dapat memfasilitasi terjadinya kesesuaian antara CPL/CPMK dengan aktivitas pembelajaran dan asesmen.

Siklus pendidikan berbasis capaian program meliputi disain kurikulum, peta kurikulum, implementasi pembelajaran, asesmen MK dan CPL, benchmarking, tindak lanjut dan peningkatan mutu, sampai kemudian merevisi CPL yang terukur. Seluruh siklus tersebut dituangkan dalam dokumen kurikulum, RPS MK, Portofolio MK, dan Portofolio Prodi.

Program studi akan selalu dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Kemampuan menyikapi tantangan dan kecenderungan zaman menjadi standar mutu bagi sebuah program studi untuk tetap kompetitif. Menurut Baedowi (2008) logika korporasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi pembiayaan, perhitungan resiko, dan kemampuan prediktif menjadi keniscayaan bagi sebuah program studi. Oleh karena itu, pengerahan segenap potensi sumber daya program studi dan fakultas menjadi modal utama yang sangat signifikan untuk melakukan pembaharuan.

Untuk mengembangkan kurikulum, diperlukan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders; ada pedoman pengembangan kurikulum; ada pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

Di dalam pengembangan kurikulum, diperlukan tahapan-tahapan yang wajib dilalui agar CPL memiliki luaran yang memadai. Pertama, tracer study untuk menemukan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan yang dirumuskan ke dalam CP. Kedua, melakukan pemetaan berbasis kebutuhan pendidikan, kehidupan berbangsa dan bernegara, dunia kerja, industri, dan pengembangan keilmuan. Ketiga, menetapkan prioritas atau perimbangan berbasis analisis kebutuhan. Keempat, melakukan eksplorasi dan pemetaan materi yang bersesuaian. Kelima, menetapkan pilihan di antara 1) memunculkan mata kuliah baru, 2) mengintegrasikan kompetensi baru yang dirumuskan ke dalam CP mata kuliah yang sudah tersedia, dan/atau 3) menghilangkan sebagian mata kuliah yang ada.

Berikut adalah ringkasan dari sebuah riset mengenai kurikulum yang melihat profil lulusan (PL), capaian pembelajaran (CP), dan Kompetensi (K) Sikap (S), Penguasaan Pengetahuan (PP), Keterampilan Khusus (KKh), dan Keterampilan Umum (KU), dan Model Pembelajaran (MP) pada kurikulum program studi (Suryaman (2020, p. 165-176).

Tabel 1. Relevansi PL, K, CP dengan MP pada Kurikulum Prodi PBI

PROFIL LULUSAN	KOMPETENSI				MP	KET.
	CP-S	CP-PP	CP-KKh	CP-KU		
• Pendidik	11	4	2	7	TR	R
• Peneliti	11	2	2	0	TR	R
• Penulis buku ajar	11	1	1	0	TR	R
• Pengembang perangkat penilaian	11	1	1	0	TR	TR
• Pengembang program pembelajaran	11	6	6	0	TR	TR
• Pengembang program pembelajaran untuk anak-anak	11	1	1	0	TR	TR
• Penerjemah	11	2	1	0	TR	R
• Penyedia layanan Bahasa Inggris (bisnis)	11	1	1	0	TR	TR
• Jumlah CP	11	18	17	7	TR	TR

Ket.: Prodi=Program Studi, PBI=Pendidikan Bahasa Inggris, PL=Profil Lulusan, K=Kompetensi, CP=Capaian Pembelajaran, MP=Model Pembelajaran, S=Sikap, PP=Penguasaan Pengetahuan, KKh=Keterampilan Khusus, KU=Keterampilan Umum, R=Relevan, TR=Tidak Relevan

Berdasarkan Tabel 1, data dapat dimaknai sebagai berikut. *Pertama*, Program Studi merumuskan PL ke dalam delapan jenis. PL yang memiliki relevansi dengan realitas profesi di dunia kerja hanya ada empat, yakni PL Pendidik, Peneliti, Penulis, dan Penerjemah (BPS, 2002), sedangkan PL yang lain lebih tepat jika dikategorikan atau disetarakan dengan nama mata kuliah. Di sisi lain, PL yang sangat dekat dengan keilmuan program studi, seperti ahli bahasa dan ahli interpretasi bahasa tidak terumuskan sebagai PL di prodi. *Kedua*, capaian pembelajaran (CP) yang mencakup CP-S, CP-PP, CP-KKh, dan CP-KU berdasarkan jumlahnya dirinci sebagai berikut. Jumlah rumusan CP-S 11 untuk delapan PL (setiap PL memiliki rumusan CP-S sama), CP-PP ada 18 rumusan, CP-KKh ada 17, dan CP-KU ada 7. Sebaran jumlah CP pada setiap PL bervariasi. Proporsi CP S dengan PL yang relevan tergolong baik karena semua CP-S harus dimiliki oleh PL. Hal senada juga terkait dengan proporsi CP PP, CP KKh, dan CP KU yang relevan dengan PL tergolong baik. Namun, salah satu PL yang tidak relevan memiliki CP yang lebih banyak daripada PL utama, yakni mencapai enam untuk semua CP selain SP S. Hal lain adalah CP-KU hanya muncul untuk PL Pendidik. Kasus yang lain adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Relevansi PL, K, CP dengan MP pada Kurikulum Prodi PBP

PROFIL LULUSAN	KOMPETENSI				MP	KET.
	CP S	CP PP	CP KKh	CP KU		
• Pendidik	11	6	5	6	TR	R
• Penerjemah	11	0	1	0	TR	R
• Pemandu Wisata	11	0	1	0	TR	R

Berdasarkan Tabel 2, data dapat dimaknai sebagai berikut. *Pertama*, Program Studi merumuskan PL ke dalam tiga jenis. Semua PL relevan dengan realitas profesi di dunia kerja. *Kedua*, proporsi CP S dengan PL yang relevan tergolong baik karena semua CP S harus dimiliki oleh PL. Namun, tidak semua PL memiliki CP. Misalnya, PL penerjemah dan pemandu wisata untuk CP PP, CP KKh, dan CP KU.

Temuan lain yang menarik adalah terkait dengan system pembelajaran. Sistem pembelajaran di dalam kurikulum hanya berisi informasi bentuk perkuliahan berupa tatap muka dan praktikum, tetapi tidak ada rumusan model pembelajaran yang dikembangkan di dalam kurikulum seperti yang ada di dalam SN-Dikti.

Data tersebut mengandung dua perspektif. Perspektif pertama masalah kemampuan merumuskan profil lulusan dan capaian pembelajaran. Rumusan profil lulusan tidak bisa dilepaskan dari dunia kerja. Secara umum profil lulusan program studi pendidikan bahasa adalah sebagai pendidik atau guru. Profil ini menjadi tumpuan pada kedua program studi yang diteliti. Namun, munculnya turunan profil lulusan yang cukup banyak belum didasarkan kajian dengan dunia kerja (BPS, 2002).

Persoalan lain yang muncul adalah PL tidak memiliki CP. Misalnya, PL penerjemah dan pemandu wisata. Gambaran ini tentulah tidak proporsional karena kompetensi lulusan tidak menggambarkan kapasitas yang memadai untuk menjadi penerjemah dan pemandu wisata. Padahal, menurut Tubiyono (2013, p 66) tuntutan capaian pembelajaran menjadi catatan penting dalam pasar kerja. Hasil risetnya menunjukkan bahwa peluang kesempatan kerja yang besar mempersyaratkan lulusan dengan kualitas tinggi, baik di level nasional maupun multinasional dengan menetapkan standar kualifikasi bahasa yang baik dengan karakter tanggung jawab, memiliki ide-ide kreatif dan inovatif.

Perspektif kedua adalah model pembelajaran dan system penilaian yang dirumuskan. Berdasarkan SN-Dikti Nomor 3 Tahun 2020 sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan hierarkinya. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber.

Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif

memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran. Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum (praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja), penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Di dalam kurikulum yang disusun, metode pembelajaran dan sistem penilaian hanya berisi informasi terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa serta aktivitas per sks, yakni tatap muka, tugas mandiri, tugas terstruktur, sifat perkuliahan serta penilaian akhir semester. Namun, elaborasi atas pembelajaran inovatif dan penilaian yang dirumuskan di dalam SN-Dikti belum dilakukan sehingga kurikulum hanya berisi daftar mata kuliah, belum dilengkapi komponen lainnya sebagai dasar implementasi.

Di dalam kurikulum, selain visi-misi, profil lulusan, capaian pembelajaran, dan daftar mata kuliah juga harus ditampilkan model pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Model pembelajaran inovatif menjadi semacam ikon di abad ke-21 atau di Era Revolusi Industri 4.0. Kemampuan pengajar dan mahasiswa untuk berpikir kritis, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif menjadi bagian yang utama untuk mencapai proses yang optimal. Luaran dari belajar bukan hanya pembelajar memiliki kompetensi, tetapi yang utama adalah kapabilitas. Kapabilitas akan melampaui kompetensi. Kompetensi hanya menjadi bagian dari kapabilitas.

Dalam beberapa kajian dijelaskan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi masa depan. Menurut Haryono dan Widhanarto, (2017) salah satu tugas pendidikan adalah menciptakan kompetensi pada diri pembelajar agar memiliki karakter kuat, terampil, kreatif, inovatif, *technopreunership*, serta peka lingkungan. Tugas

ini dapat diejawantahkan melalui kurikulum yang memadai. Oliva (2016, p.7) memastikan bahwa kurikulum perlu dipersepsi sebagai alat rekonstruksi pengetahuan secara sistematis.

Dalam perspektif pengembangan pembelajaran, kurikulum yang inovatif menjadi media transformasi para pembelajar dalam mengembangkan kemampuan memecahkan masalah berdasarkan metode ilmiah dan berpikir reflektif, seperti dikemukakan Oliva (2016, p.35) bahwa kurikulum merupakan cara terpenting dalam memfasilitasi pembelajar untuk memecahkan masalah secara reflektif, ilmiah, dan juga sebagai cara belajar yang terprogram. Hal ini sejalan dengan dua pandangan tentang kurikulum, yakni kurikulum yang berpijak pada konteks dan kurikulum yang berpijak pada strategi (Wahyudin, 2016, p. 263). Dalam perspektif konteks, pembelajaran dipandang sebagai pewarisan budaya bagi generasi muda untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang, sedangkan sebagai strategi, pembelajar dipandang sebagai proses. Kedua sudut pandang ini relevan dengan penciptaan kurikulum yang berorientasi ke masa depan.

Ada hal menarik untuk dijadikan bahan refleksi terkait dengan pembelajaran berbasis kurikulum yang berorientasi pada masa depan, yakni menautkan proses pembelajaran dengan lima pilar Unesco (2009a) yang meliputi *learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to transform one self and society*. Kurikulum dengan tatanan yang memadai memungkinkan pembelajar mampu mengonstruksi pengetahuan, memanfaatkan pengetahuan untuk kehidupan, baik untuk dirinya maupun lingkungan masyarakat. Menurut Debono (2015) setiap individu memiliki kemampuan mengelola dirinya menuju kemajuan yang tumbuh-kembang secara adaptif (*self-organizing system*) (Mayer, 2014). Artinya, rumusan dalam kurikulum harus mampu memfasilitasi pembelajar untuk mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Menurut Maksum (2015:2), kurikulum harus mampu memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran yang menginspirasi, menumbuhkan dan memperkuat rasa keingintahuan (*curiosity*) mahasiswa terhadap sesuatu. Rasa keingintahuan yang kuat akan menumbuhkan budaya belajar, keberanian bertanya, dan keinginan mencipta. Visi yang demikian yang menyebabkan Singapura, Korea, dan China, yaitu *how to instill a culture of enquiry and critical thinking into their education systems* (Leslie, 2014) menjadi negara maju dengan sistem pendidikan yang unggul, termasuk di dalamnya kurikulum.

Rumusan-rumusan harus berorientasi pada capaian pembelajaran, bukan lagi pada *content based curriculum*. Kondisi ini tentunya menjadi kendala bagi penciptaan para pembelajar yang terdidik, mampu menggunakan akal sehat, mampu berpikir kritis dan inovatif, mampu menjadi pencari solusi atas masalah, mampu mengambil keputusan secara

tepat. Yang terjadi adalah sikap yang selalu tergantung kepada orang lain. Sebagai contoh, di era pandemi korona kesiapan belajar mahasiswa dengan daring jarak jauh teramat sulit untuk dijalankan secara optimal. Berbagai kendala dihadapi mahasiswa, seperti soal kuota dan jaringan internet. Namun, secara umum persoalan yang mengemuka adalah masalah kesiapan belajar mandiri yang belum tercipta dengan baik.

Kebijakan Pemerintah dengan lahirnya Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi mengindikasikan bahwa pendidikan tinggi harus mampu melahirkan manusia Indonesia yang cakap, berkarakter, dan berdaya saing. Kurikulum menjadi salah satu komponen yang dapat membawa misi pencapaian harapan (visi) tersebut untuk menghadapi tantangan ke depan atau menurut Maksum (2015:4) sebagai peta jalan menuju harapan, yakni manusia Indonesia yang hendak kita wujudkan. Perlu disadari bahwa tantangan generasi berubah dari waktu ke waktu, dan oleh karena itu pula, kurikulum tentu perlu menyesuaikan dengan kebutuhan zamannya. Masalah yang saat ini dihadapi adalah persoalan “pergulatan” antara kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum *in action*. Acapkali kurikulum sebagai dokumen telah tersusun dengan begitu baik, namun pelaksanaannya “jauh panggang dari api”. Dalam konteks ini, peran pengelola kurikulum, dalam hal ini ketua program studi dan peran pelaksana kurikulum, yakni dosen serta mahasiswa, menjadi sangat urgen. Ada korelasi yang sangat kuat antara kepemimpinan akademik dan kualitas dosen terhadap keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Artinya, semakin tinggi komitmen kepemimpinan akademik dan dosen dalam melaksanakan kurikulum, semakin tinggi pula peluang keberhasilan capaian-capaian kurikulum.

Simpulan

Terdapat implikasi yang kuat bagi peningkatan mutu pembelajaran jika kurikulum dapat dirancang secara optimal. Kondisi demikian berelasi dengan konsepsi-konsepsi perkembangan IPTEKS. Seperti dipahami bersama bahwa universitas tidak steril dari tuntutan dan perkembangan zaman. Kemampuan menyikapi tantangan dan kecenderungan zaman menjadi standar bagi sebuah universitas untuk tetap kompetitif. Tantangan dan kecenderungan memaksa dan mengharuskan universitas untuk menerapkan logika korporasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi pembiayaan, perhitungan resiko,

dan kemampuan prediktif. Untuk itulah, diperlukan pengerahan segenap potensi sumber daya universitas untuk melakukan inovasi.

Inovasi merupakan bagian dari validasi dan perluasan keilmuan yang bermanfaat. Salah satu aspek yang penting untuk diinovasi adalah kurikulum. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen utama yang strategis di dalam sistem pendidikan. Asumsi ini memberikan dasar bahwa kurikulum tidak hanya berisi tujuan yang harus dicapai, melainkan juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar bagi mahasiswa. Artinya, dalam perspektif pembelajaran kurikulum merdeka belajar menjadi dasar yang kuat untuk menggerakkan komponen-komponen pembelajaran secara terintegrasi dan bermakna dalam menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aoun, J.E. (2017). *Robot-proof: higher education in the age of artificial intelligence*.US: MITPress.
- Badan Pusat Statistik. (2002). *KBBI 2002: Klasifikasi jenis pekerjaan indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Debono, E. (2015). *Serious creativity: how to be creative under pressure and turn ideas into action*. London: Vermilion.
- Haryono, S.E., & Widhanarto, G.P. (2017). 21st Century competencies and its implications on educational practices. *9th International conference for science educators and teachers*. Atlantis Press.
- Intel, (2017). A Guide to the Internet of Things Infographic. [online] Tersedia di: <https://www.intel.co.id/content/www/id/id/internet-of-things/infographics/guide-to-iot-new.html> [Diakses 20 Oktober 2020].
- Kelly, A.K. (2004). *The curriculum: theory and practice*. London: Sage Publications.
- Leslie, I. (2014). *Curious: the desire to know and why your future depends on it*. London: Quercus.
- Maksum, A. (2015). “Kurikulum dan pembelajaran di perguruan tinggi: menuju pendidikan yang memberdayakan”, *Makalah seminar nasional hasil penelitian pendidikan dan pembelajaran, 25-26 April 2015 di STKIP PGRI Jombang*.
- Mayer, J.D. (2014). *Personal intelligence: the power of personality and how it shapes our lives*. New York: Scientific American/Farrar, Straus and Giroux.

- Oliva, P.F. (2016). *Developing curriculum* (8rd ed.). New York: Harper Collins Publishers.
- Ornstein, A.C. and Hunkins, F.P. (2014). *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues*. Pearson Education Ltd. Edinburgh Gate, Harlow, Essex CM20 2 JE, England. Printed and bound in Vivar, Malaysia. ISBN13:978-1-978-292-16207-2.
- Sukmadinata, N.S. (2007). *Pengembangan kurikulum; teori dan praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryaman, M., Widyastuti Purbani, Tadkiroatun Musfiroh. (2020). Kurikulum dalam Perspektif Inovasi Pembelajaran. *Jurnal Kependidikan*. Vol. 3, No. 1, Mei 2020, pp165-176.
- Tubiyono. (2013). Peta bahasa expose poster pusat pembinaan karier dan kewirausahaan sebagai penyempurnaan kurikulum perguruan tinggi, *Sirok Bastra Jurnal Ilmiah Kebahasaan dan Kesastraan*, Vol. 1, No. 1, Juni 2013, p 69. Available from: <https://www.researchgate.net/publication/339535742>. [Diakses pada 21 April 2020]
- Unesco. (2009). *Education for sustainable development*. France: Division for the coordination of United Nations priorities in education.
- Wahyudin, D. (2016). Manajemen kurikulum dalam pendidikan profesi guru: studi kasus di universitas pendidikan indonesia, *Jurnal Kependidikan*, Vol. 46, No. 2, November 2016, pp 259-270.